

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Nurul Habibah¹

Ersi Sisdianto²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: habibahnurul466@gmail.com

Abstract. *Budget revenue and Expenditure (APBD) is an annual financial plan of the local government were discussed and agreed with the Regional Representatives Council (DPRD) and set by local regulations. The problem in this research are: (1) The budget is often made smaller than the potential revenue that may be obtained. This is done so that the realization of the budget revenues greater jumlahnya of budget revenue that has been created, as well as the budget is made larger than the realization of the potential that can be achieved. This resulted in inefficiency budget. (2) The users of financial statements mostly unable to understand the accounting and less able to understand and interpret the budget realization report, so it is necessary that financial performance analysis can be a tool to enable users of financial statements in understanding and interpreting the budget realization report. The formulation of the problem in this research is: "how the financial performance Bandar Lampung city budget? This study aimed to analyze the budget Bandar Lampung-year period 2013-2015. By using the ratio of Independence, Ratio Effectiveness and Efficiency Ratio, Share and Growth. The results of the study the average ratio of the independence of Bandar Lampung is located on the consultative relationship patterns. But the level of effectiveness of the financial management of Bandar Lampung is fairly effective. While the level of efficiency of financial management is relatively less*

Received April 04, 2024; Revised April 18, 2024; April 26, 2024

*Corresponding author: habibahnurul466@gmail.com

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

efficient. The financial condition of the government of Bandar Lampung is still not ideal, it can be seen from PAD contribution to the total expenditure (share) is still low but growth (growth) high PAD. This shows that the region has the potential to enhance the role of local revenue to total spending.

Keyword: Auditor Evaluation, Independence Ratio, Ratio Effectiveness and Efficiency Ratio, Share and Growth, Budget Bandar Lampung.

Abstrak. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi inefisiensi anggaran. (2) Para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta menginterpretasikan laporan realisasi anggaran, sehingga perlu analisis kinerja keuangan yang dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan realisasi anggaran. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana kinerja keuangan APBD Kota Bandar Lampung ? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis APBD Kota Bandar Lampung periode tahun 2013-2015. Dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, *Share* dan *Growth*. Hasil penelitian rata-rata rasio kemandirian Kota Bandar Lampung berada pada pola hubungan konsultatif. Namun tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bandar Lampung terbilang sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih terbilang kurang efisien. Kondisi keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum ideal, hal ini dapat dilihat dari sumbangan PAD terhadap total belanja (*share*) masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini menunjukkan bahwa daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan peran PAD terhadap total belanja.

Kata Kunci: Evaluasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, *Share* dan *Growth*, APBD Kota Bandar Lampung.

LATAR BELAKANG

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak dicantumkan dalam APBD.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis APBD adalah Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan APBD. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan upaya pembangunan suatu daerah.

Masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi inefisiensi anggaran. (2) Para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta menginterpretasikan laporan realisasi anggaran, sehingga perlu analisis kinerja keuangan yang

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan realisasi anggaran.

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana kinerja keuangan APBD Kota Bandar Lampung ?”.

TINJAUAN TEORITIS

Keuangan

Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah (Sundjaja dan Barlian, 2002).

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan efisien (Sartono, 2001).

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Sutrisno, 2003). Manajemen keuangan atau yang sering pula disebut dengan istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset (Martono dan Hartijo, 2007). Manajemen keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana secara efektif dan efisien mungkin menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi (Darsono, 2010).

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Jumingan, 2006). Kinerja Keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual (Darise, 2008). Berdasarkan definisi kinerja keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa

kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual. Kinerja Keuangan Daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan mengandung beberapa tujuan (Jumingan, 2006): (1) Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. (2) Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan kinerja masa datang.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan (Munawir, 2007). Laporan keuangan sektor publik meliputi (Mahmudi, 2011) yaitu: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LK-K/L) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD). Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah meliputi: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Pelaporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk (*Government Accounting Standard Board* (GASB, 1998): (1) Membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel terhadap publik. (2) Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Laporan keuangan yang disampaikan setidaknya meliputi: (1) Laporan Realisasi APBD, Laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran. (2) Neraca, Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemda mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran. (3) Laporan Arus Kas, Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemda selama satu tahun anggaran. (4) Catatan Atas Laporan Keuangan, Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas.

Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Terdapat dua alasan mengapa pemerintah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu (Mahmudi, 2011): (1) laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. (2) Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal, yaitu kepada pihak-pihak di dalam organisasi, misalnya atasan, pegawai, dan pemeriksa maupun pertanggungjawaban eksternal. Kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, misalnya masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Peranan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan beberapa hal seperti: realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan. Suatu entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian targetnya serta seberapa jauh hasil yang telah dicapai oleh entitas pada suatu periode pelaporan keuangan yang bertujuan untuk beberapa kepentingan: (1) Akuntabilitas, Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (2) Manajemen, Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan. (3) Transparansi, Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. (4) Keseimbangan Antargenerasi, Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah (Mahmudi, 2011): (1) Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. (2) Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik. (3) Memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Tujuan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari standar akuntansi pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik dengan (Mahmudi, 2011): (1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. (2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai. (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan dilakukan selama periode pelaporan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Halim, 2007). Pendapatan Daerah digolongkan menjadi tiga (Darise, 2008).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri dari: (1) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari: (1) Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai faktor pemerataankapasitas fiskal. DAU suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Mencakup: hibah/ bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penang-gulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/ kota, dana penyesuaiaan, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda (Darise, 2008). Belanja Daerah terdiri dari: (1) Belanja Aparatur Daerah, yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. (2) Belanja Pelayanan Publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum dan (3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturandaerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi Otorisasi. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Fungsi Perencanaan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (3) Fungsi Pengawasan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Fungsi Alokasi. Artinya bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian

Analisis Keuangan Pada APBD

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan (Halim, 2008). Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk: (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. (2) Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. (3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. (4) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan, Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi seperti: buku literatur, majalah, naskah, catatan sejarah, dokumen.

Penelitian Lapangan, Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian Pemkot Bandar Lampung melalui observasi, wawancara, dan pencatatan data.

Metode Analisis

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Rumusan rasio kemandirian daerah (Halim, 2002) yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Halim 2002

Pola Hubungan Instruktif, Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pola Hubungan Konsultatif, Dimana campurtangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi. Pola Hubungan Partisipatif, Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Pola Hubungan Delegatif, Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektifitas, Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektivitas (Halim, 2002) yaitu:

$$\text{Rasio Efektifita} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber: Halim 2002.

Rasio Efisiensi, Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Share and Growth, Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan *share* merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. dan *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun *i* dari tahun *i-1*.

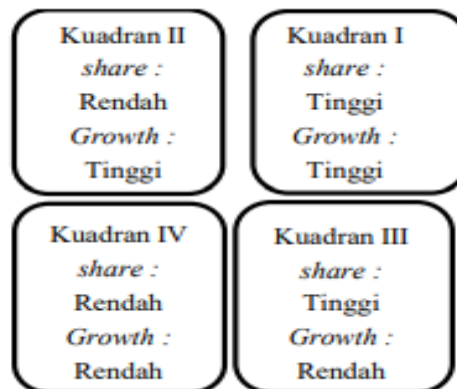
$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_i - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_{*i*} = Pendapatan Asli Daerah periode *i*,

PAD_{i-1} = = Pendapatan Asli Daerah periode i-1



Gambar 1 Peta Kemampuan Keuangan Metode Kuadran *Growth* (%)

Pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran, yang dimaksud metode kuadran adalah salahsatu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis yang dilakukan untuk meihat menganalisis APBD Kota Bandar Lampung periode tahun 2013-2015. Dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, *Share* dan *Growth*, sebagai berikut:

Rasio Kemandirian. hasil dari rasio kemandirian APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013-2015 disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rasio Kemandirian APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013-2015 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2013	418.111.740.815	1.758.916.811.826	23,77%	Instruktif
2014	495.200.463.931	1.985.273.081.931	24,94%	Instruktif
2015	769.108.142.606	2.325.136.392.212	33,08%	Konsultatif
Rata-rata rasio kemandirian			27,26%	Konsultatif

Sumber: (data diolah, 2016).

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan Tabel 4 diatas hasil analisa diatas dapat dilihat, rasio kemandirian Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil analisa diatas dapat dihitung besarnya rasio kemandirian pada tahun 2013 menghasilkan angka sebesar 23,77%, dimana PAD Rp 418.111.740.815 dibagi dengan total pendapatan Rp 1.758.916.811.826. Rasio kemandirian pada tahun 2014 menghasilkan angka sebesar 24,94%, dimana PAD Rp 495.200.463.931 dibagi dengan total pendapatan sebesar Rp 1.985.273.081.931. Rasio kemandirian pada tahun 2015 menghasilkan angka sebesar 33,08%, dimana realisasi PAD sebesar Rp 769.108.142.606 dibagi dengan total pendapatan sebesar Rp 2.325.136.392.212. Jadi rata-rata rasio kemandirian Kota Bandar Lampung selama 3 tahun sebesar 27,26%. Dengan jumlah rasio tersebut, menurut pola hubungan tingkat ke-mandirian daerah tingkat kemandirian daerah Kota Bandar Lampung dikatakan rendah, sehingga masuk kedalam kategori pola hubungan konsultatif,yaitu berkisar antara 25%-50%. Dalam pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulaiberkurang.

Jika dilihat dari tabel, pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung lebih cenderung me-ningkat begitu juga dengan total pendapatan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota BandarLampung belum optimal dalam menggali potensi yang ada di daerah baik berupa pajak, retribusi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, se-hingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Rasio Efektivitas, hasil dari Rasio Efektivitas APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013-2015 dapat disajikan pada Tabel 5:.

**Tabel 5. Rasio Efektivitas APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran
2013-2015 (Dalam Rupiah)**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Rasio Efektivitas
2013	360.698.350.131	142.319.786.625	253,44%	Sangat Efektif
2014	394.662.039.446	36.988.566.767	1066,98%	Sangat Efektif

2015	397.547.326.856	37.734.415.036	1053,54%	Sangat Efektif
<u>Rata-rata rasio efektivitas</u>			<u>791,32%</u>	
			<u>Sangat</u>	<u>Efektif</u>

Sumber: (data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, rasio efektivitas Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015 cenderung berfluktuasi, dimana terjadi kenaikan dan penurunan antara rasio efektivitas tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Hasil perhitungan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD menunjukkan bahwa pada tahun 2013 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 360.698.350.131 dibagi dengan target penerimaan PAD Rp 142.319.786.625, sehingga rasio efektivitasnya menghasilkan angka sebesar 253,44%. Tahun 2014 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 394.662.039.446 dibagi dengan target penerimaan PAD Rp 36.988.566.767, sehingga rasio efektivitasnya menghasilkan angka sebesar 1066,98%. Tahun 2015 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 397,547,326,856 dibagi dengan target penerimaan PAD Rp 37.734.415.036, sehingga rasio efektivitasnya sebesar 1053,54%.

Jika dilihat dari tabel hasil perhitungan dan grafik keseluruhan rasio efektivitas Kota Bandar Lampung selama 3 tahun, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas semua periode dikatakan sangat efektif. Rata-rata rasio efektivitas Kota Bandar Lampung selama 3 tahun sebesar 791,32%. Dengan jumlah tersebut, kriteria rasio efektivitas Kota Bandar Lampung masuk kedalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) memiliki kemampuan yang baik dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

Rasio Efisiensi, hasil perhitungan Rasio Efisiensi APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013-2015 disajikan pada Tabel 6:.

Tabel 6. Rasio Efisiensi APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013-2015 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi
2013	1.779.859.865.267	1.688.412.290.739	105,42%	Tidak Efisien

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

2014	1.799.489.292.913	1.836.019.197.114	98,01%	Kurang Efisien
2015	1.757.419.863.235	1.843.540.674.593	95,33%	Kurang Efisien
Rata-rata rasio efisiensi			99,59%	
			Kurang	Efisien

Sumber: (data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 6. diketahui bahwa rasioefisiensi Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015, rasio efisiensi Kota Bandar Lampung terus mengalami penurunan dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015. Rasio efisiensi pada tahun 2013 realisasi belanja daerah sebesar Rp 1.779.859.865.267 dibagi dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.688.412.290.739 sehingga rasio efisiensi menghasilkan angka sebesar 105.42%. Tahun 2014 realisasi belanja daerah sebesar Rp 1.799.489.292.913 dibagi denganrealisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.836.019.197.114 sehingga rasio efisiensimenghasilkan angka sebesar 98.01%. Tahun 2015 realisasi belanja daerah sebesar Rp 1.757.419.863.235 dibagi dengan realisasi pendapatan daerah Rp 1.843.540.674.593 sehingga rasio efisiensi menghasilkan angka sebesar 95,33%. Dengan jumlah tersebut, rata-rata rasio efisiensi Kota Bandar Lampung adalah sebesar 99,59%. Menurut kriteria efisiensiKota Bandar Lampung masuk ke dalam kriteria kurang efisien. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya sehingga belanja tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatandaerah. Kota Bandar Lampung masih harus mengalokasikan belanja yang berkontribusi besar dalam pendapatan daerahnya. Serta melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pemborosan dalam anggaran belanja daerah sehingga rasio efisiensi Kota Bandar Lampung dapat lebih baik lagi.

Share and Growth, hasil dari perihitungan *Share* APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013-2015 disajikan pada Tabel 7:.

**Tabel 7. Share APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013-2015
(Dalam Rupiah)**

Tahun			
Anggaran	PAD	Total Belanja	Nilai

2013	418.111.740.815	1.884.296.335.261	22,19%
2014	495.200.463.931	1.964.777.648.699	25,20%
2015	769.108.142.606	2.275.789.706.047	33,80%
Rata-rata share			27,06%

Sumber: (data diolah, 2016).

Berdasarkan Tabel 7 diatas diketahui bahwa share Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015 ternyata mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Share pada tahun 2013 PAD daerah sebesar Rp 418.111.740.815 dibagi dengan total belanja sebesar Rp 1.884.296.335.261 sehingga share menghasilkan angka sebesar 22,19%. Tahun 2014 PAD daerah sebesar Rp 495.200.463.931 dibagi dengan total belanja sebesar Rp 1.964.777.648.699 sehingga share menghasilkan angka sebesar 25,20%. Tahun 2015 PAD daerah sebesar Rp 769.108.142.606 dibagi dengan total belanja sebesar Rp 2.275.789.706.047 sehingga share menghasilkan angka sebesar 33,80%.

Dari perhitungan share selama 3 tahun maka diperoleh rata-rata *share* sebesar 27,06%. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah artinya pemerintah daerah masih harus menggali potensi yang dimilikinya secara lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

Dilihat dari data yang ada dalam tabel, growth Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2014 PAD sebesar Rp 495.200.463.931 dikurangi dengan PAD tahun dasar 2013 sebesar Rp 418.111.740.815 selisih PAD Rp 77.088.723.116 kemudian PAD 2014 dibagi dengan selisih PAD tahun dasar maka diperoleh growth yang menghasilkan angka sebesar 18,44%. Tahun 2015 PAD sebesar Rp 769.108.142.606 dikurangi dengan PAD tahun dasar 2014 Rp 495.200.463.931 selisih PAD Rp 273.907.678.675 kemudian PAD 2015 dibagi dengan selisih PAD tahun maka diperoleh growth yang menghasilkan angka sebesar 55,31%.

Dari perhitungan share dan growth anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013 sampai dengan 2015, maka diperoleh rata-rata share sebesar 27,06%. dan growth sebesar 36,87%. Kemudian pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran posisi Kota Bandar Lampung berada

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

pada kuadran II, kondisi ini belum ideal. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan PAD terhadap total belanja (*share*) masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini menunjukkan bahwa daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan peran PAD terhadap total belanja.

Analisis Komparatif

Rasio Kemandirian, hasil dari Penilaian Komparatif Rasio Kemandirian APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2015 dapat disajikan ke Tabel 8:.

**Tabel 8. Penilaian Komparatif Rasio Kemandirian APBD Bandar Lampung
Tahun 2013-2015**

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2013	23,77	-	-
2014	24,94	4,93	Naik
2015	33,08	32,61	Naik
Rata-rata	27,26		

Sumber: (data diolah, 2016).

Berdasarkan Tabel 8 diatas diketahui bahwa penilaian komparatif rasio kemandirian APBD Kota Bandar Lampung tahun 2013 sampai dengan 2015 didapatkan rata-rata sebesar 27,26%. Dapat diketahui bahwa pada kondisi rasio kemandirian pada tahun 2013 sebesar 23,77% dan terjadi kenaikan pada tahun 2014 sebesar 24,94%, dimana terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 4,93%, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan terhadap PAD dan total pendapatan daerah. Dimana pertumbuhan PAD lebih kecil yaitu 77.088.723.116 atau 18,44% dibandingkan dengan total pendapatan daerah sebesar 226.356.270.105 atau 12,87%. PAD mengalami kenaikan karena pemasukan dari pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, sedangkan total mengalami kenaikan dikarenakan kenaikan pada PAD dan pendapatan transfer.

Rasio Efektivitas, hasil dari penilaian komparatif rasio efektivitas apbd kota Bandar Lampung tahun 2013-2015 disajikan dalam Tabel 9.

**Tabel 9 .Penilaian Komparatif Rasio Efektivitas APBD Bandar Lampung Tahun
2013-2015**

Tahun	Rasio Efektivitas	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2013	253,44	-	-
2014	1066,98	321,00	Naik
2015	1053,54	(1,26)	Turun
Rata-rata	791,32		

Sumber : (data diolah 2016).

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa penilaian komparatif rasio efektivitas APBD Kota Bandar Lampung tahun 2013 sampai dengan 2015 didapatkan rata-rata sebesar 791,32%. dapat diketahui bahwa pada kondisi rasio efektivitas pada tahun 2013 sebesar 253,44% dan terjadi kenaikan pada tahun 2014 sebesar 1066,98%, dimana terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 321,00%, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan terhadap realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD (lampiran 2). Dimana pertumbuhan realisasi penerimaan PAD lebih besar yaitu : 33.963.689.315 atau 9,42% dibandingkan dengan target penerimaan PAD sebesar (105.331.219.858) atau (74,01)%. Realisasi penerimaan PAD mengalami kenaikan karena pemasukan dari pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, sedangkan target penerimaan PAD mengalami kenaikan dikarenakan kenaikan pada PAD dan pendapatan transfer . Rasio efektivitas 2015 sebesar 1053,54%. Dimana terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar (1,26)%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan terhadap realisasi penerimaan PAD dan kenaikan pada target penerimaan PAD. Dimana pertumbuhan realisasi penerimaan

Rasio Efisiensi, hasil dari Penilaian Komparatif Rasio Efisiensi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2015 disajikan pada Tabel 10:.

Table 10. Penilaian Komparatif Rasio Efisiensi APBD Bandar Lampung Tahun 2013-2015

Tahun	Rasio Efisiensi	Pertumbuhan (%)	Keterangan
2013	105,42%	-	-
2014	98,01%	(7,03)	Turun
2015	95,33%	(2,74)	Turun
Rata-rata	99,59%		

Sumber : (data diolah 2016).

MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan Tabel 10 diatas diketahui bahwa penilaian komparatif rasio efisiensi APBD Kota Bandar Lampung tahun 2013 sampai dengan 2015 didapatkan rata-rata sebesar 99,59%. Dapat diketahui bahwa pada kondisi rasio efisiensi pada tahun 2013 sebesar 105,42% dan terjadi penurunan pada tahun 2014 sebesar 98,01%, dimana terjadi penurunan pertumbuhan sebesar (7,03)%, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan terhadap realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah. Dimana pertumbuhan realisasi belanja daerah lebih kecil yaitu 19.629.427.646 atau 1,10% dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 147.607.506.375 atau 8,74%. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan di karenakan belanja pegawai dan belanja barang menurun sedangkan realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan di karenakan kenaikan pada PAD dan pendapatan transfer.

Rasio efisiensi 2015 sebesar 1053,54%. Dimana terjadi penurunan pertumbuhan sebesar (2,74)%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan terhadap realisasi belanja daerah dan kenaikan pada realisasipendapatan daerah (lampiran 3). Dimana pertumbuhan realisasi belanja daerah lebih kecil yaitu (42.069.429.678) atau (2,34)% dibandingkan realisasi pendapatan daerah sebesar 7.520.877.479 atau 0,41%. Realisasibelanja daerah mengalami penurunan di karenakan belanja pegawai dan belanja barang menurun, sedangkan realisasi pendapatan daerah mengalamiefisien dengan rata-rata rasio mendapat angka sebesar 99,59%. Hal ini menunjukkan bahwaperbandingan belanja terhadap pendapatanbelum efisien. *Share and growth* anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 diperoleh angka *Share* sebesar 27,06% dan *growth* sebesar 36,87%. Hal ini menunjukan kondisi PAD belum ideal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa hasilnya yaitu: (1) Rasio kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, rata-rata rasio kemandirian Kota Bandar Lampung tahun anggaran tahun2013 sampai dengan tahun 2015 mendapat angka sebesar 27,26%. Hal ini menunjukan campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang. (2) Rasio efektivitas Kota BandarLampung masuk kedalam kriteria sangat efektif, rata-rata rasio dengan angka sebesar 791,32%. Hal ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikanPAD sudah sangat efektif. (3) Rasio efisiensi

selama 3 tahun masuk ke dalam kriteria kurang efisien dengan rata-rata rasio mendapat angka sebesar 99,59%. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan belanja terhadap pendapatan belum efisien. (4) *Share and growth* anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 diperoleh angka *Share* sebesar 27,06% dan *growth* sebesar 36,87%. Hal ini menunjukan kondisi PAD belum ideal.

DAFTAR REFERENSI

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta.: PT Indeks
- Darsono. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Consultant Accounting Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. UPP STIM.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muna-wir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Martono dan Hartijo, Agus. 2007. *Manajemen Keuangan. Edisi Pertama*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Ekorisia
- Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Internasional*, Yogyakarta: BPFE
- Sundjaja, Ridwan dan Barlian, Inge. 2002. *Manajemen Keuangan Satu, Edisi ke Empat*, Jakarta: Literata Lintas Media
- Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- .